

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Pesisir dan Laut merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki kekayaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Secara ekologis pesisir dan laut merupakan sumber daya yang sangat kompleks yang mempunyai karakteristik saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan karakteristik wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat kompleks, pengamatan dan penelitian terdahulu didapatkan bahwa ada 13 objek-objek ruang perairan di Indonesia yang di manfaatkan oleh kepentingan umum, 13 objek ruang perairan meliputi : bangunan atas air, budidaya, harta karun, kabel dan pipa bawah laut, konservasi, kultur adat, pariwisata laut, pembuangan sampah, perikanan, pelayaran, eksploitasi minyak, gas dan mineral, sumber energi terbarukan dan militer (Djunarsjah, 2019).

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Lampung mempunyai wilayah pesisir dan Laut yang cukup luas, yaitu memiliki panjang garis pantai 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan luas wilayah pesisir sekitar 440.01 ha dan luas perairan laut dalam batas 12 mil adalah 24.820,0 km² yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia (Pantai Barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut Jawa (Pantai Timur Lampung).

Sehubungan dengan karakteristik wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan yang kompleks merupakan sebuah potensi besar yang harus di manfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat, namun konflik kepentingan di wilayah pesisir terus meningkat. Peningkatan konflik ini dipicu dengan peningkatan jumlah penduduk, intensitas kegiatan manusia yang terkait dengan perkembangan teknologi di wilayah tersebut, yang mengakibatkan kegiatan manusia di wilayah pesisir meningkat serta menjangkau wilayah laut yang lebih luas, khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya. Masalah-masalah yang ada di kawasan pesisir dan lautan dapat disebabkan serta dipicu oleh banyak faktor, salah satu penyebab konflik di kawasan pesisir dan laut di Provinsi

Lampung yaitu terkait dengan penggunaan dan pengelolaan objek-objek ruang perairan seperti dengan adanya aspek legalitas di wilayah pesisir dan laut umumnya tidak jelas, terutama area yang didirikan bangunan-bangunan di atas air yang di jadikan suatu permukiman dimana permukiman diatas air cenderung rapat dan kumuh dan belum tertata. Segala permasalahan ini dipicu akibat ada kesalahan pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Dengan adanya tumpang tindih kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang masih belum memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan (Leksono, 2019)

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan terkait dengan upaya pelestarian terhadap objek-objek ruang perairan, seperti di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya setiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Di dalam peraturan per Undang-Undangan No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan undang-undang yang membahas terkait dengan pengelolaan kelautan yang berkaitan dengan objek ruang perairan dimana sistem penggunaannya menerapkan konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Permasalahan terhadap tumpang tindih kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terjadi menimbulkan banyak persoalan, maka peran dari kadaster kelautan sangatlah penting untuk sebuah pencatatan penggunaan objek ruang perairan yang digunakan baik oleh masyarakat maupun pihak instansi pemerintah. sehingga di perlukan kajian terkait dengan Inventarisasi Objek-Objek Ruang Perairan untuk Mendukung Implementasi Kadaster Kelautan di Sebagian Provinsi Lampung.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana identifikasi objek-objek ruang perairan yang ada di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pengelolaan objek-objek ruang perairan yang ada di sebagian Provinsi Lampung ?
3. Bagaimana alternatif strategi dalam pengelolaan objek-objek ruang perairan di sebagian provinsi lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi objek-objek ruang perairan yang ada di sebagian Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengelolaan objek-objek ruang perairan yang ada di sebagian Provinsi Lampung dalam konsep kadaster kelautan.
3. Mendapatkan alternatif strategi dalam pengelolaan objek-objek ruang perairan dalam pengelolaan dan penggunaan yang berkelanjutan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

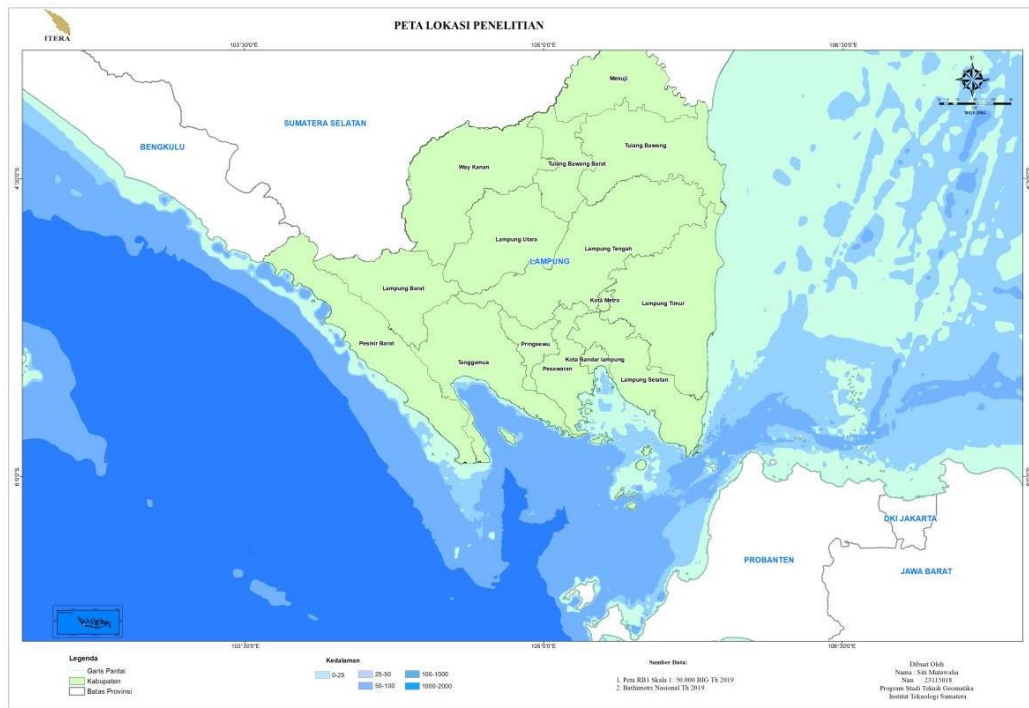
1. Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai masukan atau rekomendasi dalam melaksanakan prioritas strategi pengelolaan objek ruang perairan
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan pesisir yang memperhatikan konsep kadaster kelautan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Daerah penelitian dilakukan di wilayah perairan Provinsi Lampung, dengan mengidentifikasi objek-objek Ruang Perairan yang terdapat di

Provinsi Lampung. disajikan dalam **Gambar 1.1**.



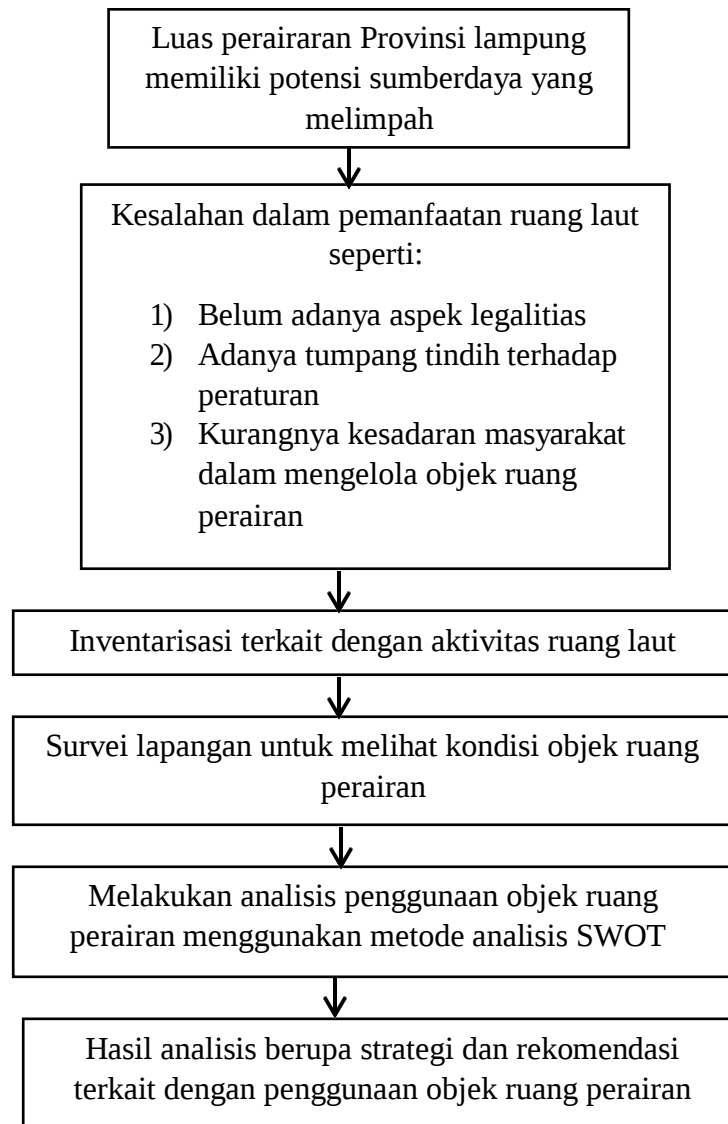
Gambar 1.1 Lokasi Penelitian

Sumber: Pengolahan ArcGis

- b) Melakukan kajian terhadap analisis kebijakan pemanfaatan objek-objek perairan yang ada di sebagian Provinsi Lampung.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dimana diawali dengan tahap persiapan yang meliputi studi literatur yang terkait dengan tugas akhir berdasarkan buku dan jurnal, dan sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu terkait dengan pengumpulan data yaitu data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung dan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian dilakukan inventarisasi terhadap objek-objek ruang perairan yang ada di Provinsi Lampung serta dilakukan analisis terhadap konsep kadaster kelautan. Secara visual metodologi penelitian disajikan dalam **Gambar 1.2** Kerangka Berfikir



Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai berikut.

BAB I- PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir ini.

BAB II- TEORI DASAR

Bab II teori dasar berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III- METODOLOGI PENELITIAN

BAB III metodologi penelitian menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil sebagai dasar untuk inventarisasi objek-objek ruang perairan di Provinsi Lampung untuk implementasi kadaster kelautan.

BAB IV-HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV hasil dan pembahasan data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

BAB V- KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V kesimpulan dan saran merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.